



# Bajaj Maxride Masih Beroperasi Ilegal

## Kewenangan Penertiban Ada di Kabupaten/Kota

**JOGJA** - Bajaj *Maxride* sampai saat ini masih beroperasi secara ilegal. Sebab kendaraan roda tiga ini masih belum mengantongi izin sebagai angkutan umum. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DJI Chrestina Emi Widyastuti mengatakan, semestinya apabila kendaraan tersebut belum mengantongi izin harus dilakukan penertiban. Kewenangan penertiban menurutnya berada di pemerintah kota/kabupaten masing-masing. "Ini kan kabupaten sudah mengeluarkan surat edaran untuk tidak mengizinkan bajaj *Maxride* di wilayah masing-masing," ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon kemarin (30/9). Hanya saja, dia belum mengetahui soal sosialisasi penertiban

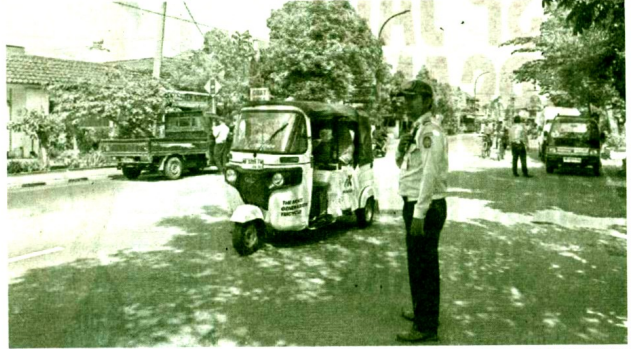
●●

Ini kan kabupaten sudah mengeluarkan surat edaran untuk tidak mengizinkan bajaj *Maxride* di wilayah masing-masing."

**Chrestina Emi Widyastuti**  
Kepala Dishub DJI

yang dilakukan pemkab maupun pemkot. "Seharusnya teman-teman kabupaten/kota kalau sudah ada aturan, semestinya tahapannya harus dilakukan mulai sosialisasi dan sebagainya," paparnya. Dia menegaskan, tahapan itu bukan hanya untuk kendaraan bajaj *Maxride* saja. Namun seluruh perusahaan kendaraan penyedia layanan. "Masyarakat sebaiknya menggunakan kendaraan yang berizin, (kendaraan) itu kan se-

harusnya pelat kuning," jelasnya. Diketahui, kendaraan angkutan umum dan kendaraan niaga yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan imbalan jasa harus berpelat kuning. Seperti taksi, angkot, bus, dan truk logistik. Namun dalam kasus ini, bajaj *Maxride* yang beroperasi di jalanan masih menggunakan pelat hitam maupun putih. "Kami akan berkoordinasi lagi dengan kabupaten/kota sampai mana pergerakan mereka," lontarnya. Selama ini, Dishub DJI telah mengingatkan kepada pemangku kebijakan wilayah masing-masing. "Kami sejak awal sudah mengingatkan tapi tidak diindahkan," sebutnya. Dia khawatir, maraknya kendaraan bajaj ini akan menimbulkan beragam masalah. Seperti semakin padatnya kendaraan di area Kota Jogja, hingga timbulnya persaingan usaha. "Sudah ada ojek *online*



**NGEYEL!** Angkutan umum berbasis online dan berbentuk bajaj hingga kini belum melengkapi izin beroperasi. Dishub DJI telah berkoordinasi dengan Dishub Kota Jogja untuk menyiapkan langkah penertiban guna menyikapi masalah ini. dan sebagainya, ini nanti bisa sekarang," katanya. *Radar Jogja* sudah mencoba menghubungi PT Maxride dan Max Auto yang ada di DJI. Namun sampai saat ini belum ada jawaban. (oso/eno/by)

| Instansi             | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|----------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Dinas Perhubungan | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 29 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005